

PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI PERBATASAN ANTARNEGARA

PARTICIPATION OF COASTAL COMMUNITIES IN DEVELOPMENT COMMUNICATION IN THE BORDER REGIONS

Syf. Aminah¹, Sumardjo², Arif Satria³, Irwan Abdullah⁴

¹Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

^{2,3}Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

⁴Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada

^{1,2,3}Jl. Kamper, Babakan Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680

⁴Jl. Nusantara 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

syarifahmimien@gmail.com

Diterima : 07 November 2018

Direvisi : 27 November 2018

Disetujui : 26 Februari 2019

ABSTRACT

The communities of the border regions are often found in the category of poverty-prone disadvantaged areas. Development communication has the potential to become a means of building commitment on the basis of mutual interests, thus increases the active role of the community in accordance with its needs and as an effort to improve their welfare. This study was conducted at Temajuk village in the borderlands between Sambas Regency, West Kalimantan and Malaysia, using a survey method with cluster random sampling techniques with hamlet clusters. Two hundred thirty-six samples were analyzed to fulfill the requirements of statistical tests. The research objective was to analyze coastal community participation in development communication and the factors that influence community participation. The results of the study showed that: (1) the level of community participation in development communication was low; (2) factors related to community participation in development communication were, among others, individual characteristics, social environment, government intervention and infrastructure support.

Keywords : Community Participation, Development Communication, Coastal Communities

ABSTRAK

Masyarakat perbatasan antarnegara sering ditemukan berada pada kategori daerah tertinggal yang rawan kemiskinan. Komunikasi pembangunan berpotensi menjadi sarana membangun komitmen atas dasar kepentingan bersama, sehingga dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dan sekaligus merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan di desa Temajuk, perbatasan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dengan Malaysia. Penentuan sampel menggunakan teknik *cluster random sampling* dengan klaster dusun. Sampel penelitian berjumlah dua ratus tiga puluh enam orang sesuai ketentuan uji statistik. Tujuannya adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pesisir terhadap komunikasi pembangunan dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan ternyata rendah, (2) faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan antara lain: karakteristik individu, lingkungan sosial, intervensi pemerintah dan dukungan infrastruktur.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Komunikasi Pembangunan, Masyarakat Pesisir

PENDAHULUAN

Masyarakat perbatasan negara sering ditemukan berada pada kategori daerah tertinggal dan rawan kemiskinan, sebagaimana dijumpai di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Kerawanan di wilayah perbatasan negara dapat menjadi ancaman terhadap berbagai aspek kepentingan nasional dan masyarakat perbatasan negara bila dikaitkan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya sosial. Permasalahan daerah perbatasan yang kerap identik dengan kawasan tertinggal yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Sutaat, 2012).

Kondisi pelaksanaan program pembangunan di perbatasan antarnegara pada umumnya hanya terfokus pada pembangunan fisik. Pelaksanaan program pembangunan selama ini masih belum terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah dan program tidak tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kawasan perbatasan merupakan bentuk kontribusi warga negara dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Menurut Sumardjo (2010), partisipasi memungkinkan terwujudnya perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir manusia. Perubahan yang terjadi melalui proses partisipasi akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Pendekatan komunikasi pembangunan partisipatif merupakan sarana membangun kesepahaman dan komitmen atas dasar kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

dapat mengatasi masalah mereka. Rogers (1989) mengemukakan bahwa strategi komunikasi pembangunan merupakan suatu rencana atau pola untuk mengubah perilaku manusia melalui transfer atau penyampaian ide-ide baru (inovasi). Proses komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi secara terus-menerus yang akhirnya akan menimbulkan kesamaan pengertian di antara partisipan.

Kabupaten Sambas merupakan kabupaten di ujung barat Kalimantan, yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia. Kabupaten Sambas menempati peringkat pertama wilayah perbatasan dengan kondisi tertinggal, terpencil, terluar dan memiliki keterbatasan sarana dan prasarana (Bappeda Kalimantan Barat, 2016). Salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu Kecamatan Paloh, merupakan pengembangan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) (Bappenas, 2015), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Desa Temajuk Kecamatan Paloh merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Luas wilayah Desa Temajuk adalah 230 km² atau 20 persen dari luas wilayah Kecamatan Paloh. Partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan tampak pada kegiatan musrenbang dusun, musrenbang desa, pertemuan rutin masyarakat atau rembug warga, dan kegiatan rutin lainnya di desa. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi, ide dan pendapat dari seluruh warga dapat disampaikan sehingga proses pembangunan desa dapat terlaksana secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan antarnegara memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejah-

teraan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut, yakni bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pesisir di perbatasan antarnegara dalam komunikasi pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam komunikasi pembangunan; (2) menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran mengenai penerapan model komunikasi yang tepat bagi pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan pada masyarakat pesisir di perbatasan antarnegara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli. Pada umumnya, mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Rogers (1976) mengemukakan bahwa secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial. Servaes dan Malikhao (2016) mengemukakan bahwa komunikasi dan perubahan sosial yang berfokus pada pendekatan partisipatif dapat memfasilitasi dialog. Hasil penelitian Msibi dan Penzhorn (2010) menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Kheerajit dan Flor (2013) mengemukakan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif secara langsung berkorelasi dengan pengetahuan, sikap dan praktik pengelolaan sumber daya alam. Ini berarti bahwa ketika tingkat komunikasi

pembangunan partisipatif meningkat, maka pengetahuan, sikap dan praktik para pemangku kepentingan juga meningkat. Muchtar (2016) mengemukakan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif harus menjamin terwujudnya kerja sama timbal balik pada setiap tingkatan partisipasi. Artinya, setiap pihak harus berusaha menghargai dan menghormati pendapat dan sikap orang lain serta memiliki rasa saling percaya. Komunikasi partisipatif lebih memfokuskan pada penciptaan makna bersama, yang menitikberatkan pada tercapainya kesepahaman atau kesepakatan. Penelitian terdahulu tentang komunikasi pembangunan dan partisipasi pembangunan memang sudah banyak dilakukan. Namun, belum ada yang membahas tentang komunikasi pembangunan pada masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dari aspek substansi, yaitu implementasi partisipasi komunikasi pembangunan pada masyarakat pesisir di perbatasan antarnegara. Partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan penelitian ini dimaknai sebagai proses pertukaran pesan antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan proses pembangunan.

Pembangunan partisipatif merupakan model pembangunan yang melibatkan *stakeholders* dalam semua proses, mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Pelaku pembangunan adalah semua unsur yang ada dalam komunitas, yang terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Partisipasi menghendaki adanya peran aktif dari seluruh anggota masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan. Paradigma pembangunan partisipatoris memiliki dua perspektif. Pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam

pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, persepsi, pola sikap, pola pikir dan nilai-nilai serta pengetahuan masyarakat setempat turut dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan. Kedua, pengakuan bahwa umpan balik (*feedback*) pada hakikatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari kegiatan pembangunan (Mikkelsen, 1999). Uphoff (1985) dalam Inagaki (2017) mengemukakan bahwa partisipasi dilakukan dalam tahapan berikut: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan; (3) partisipasi dalam evaluasi; dan (4) partisipasi dalam menerima manfaat.

Komunikasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Secara teoritis, pemahaman mengenai lingkungan sosial dapat diartikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif. Dalam hal ini, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan, yakni: (1) ketahanan sosial (daya dukung dan daya tampung sosial setempat); (2) keadaan ekosistem; (3) tata ruang; (4) kualitas sosial setempat (kualitas objektif dan subjektif); (5) sumber daya sosial (potensi) dan pembatasan (pantangan sosial) kemasyarakatan (berupa pranata, pengetahuan lingkungan, dan etika lingkungan); dan (6) kesesuaian dengan azas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup (Purba, 2005).

Pemerintah setiap negara terlibat langsung untuk mengambil peranan penting dalam menunjang pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan menjadi sasaran utama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kerangka

normatif kewenangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pembangunan wilayah perbatasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah dapat menugaskan pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam pembangunan kawasan perbatasan. Kewenangan pemerintah daerah dalam kawasan perbatasan negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dilakukan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas masyarakat yang dinamis dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Effendi (2002) mengemukakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik, baik sarana pendidikan, jembatan, transportasi, air bersih, teknologi dan komunikasi, bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor berminat menanamkan modalnya di daerah. Jika tidak, maka biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan. Akibatnya, harga produk tersebut akan lebih mahal dibandingkan produk sejenis, sehingga produk tersebut menjadi tidak kompetitif.

METODOLOGI PENELITIAN

Didesain sebagai penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian survei yang dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis uji korelasi Pearson. Penelitian ini dilakukan di Desa Temajuk

Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Dipilihnya Desa Temajuk didasari alasan bahwa desa ini merupakan daerah pesisir di perbatasan negara di Kalimantan Barat. Lokasi desa ini berada di sebelah utara bagian barat pulau Kalimantan dan hanya berjarak 4 kilometer dari Telok Melano, Serawak Malaysia. Penelitian ini menggunakan rancangan sampel probabilitas (*probability sampling*). Artinya, penarikan sampel didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Bungin, 2006).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Desa Temajuk yang berjumlah 574 KK. Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus *Slovin* (Sevilla *et al.*, 1993), diperoleh total responden minimal sebanyak 236 KK. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 - April 2018.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang berisi 134 pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat, petani dan nelayan. Adapun diskusi kelompok (*FGD/Focused Group Discussion*) diadakan bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pemuda dan perwakilan masyarakat. Selain wawancara dan FGD, dilakukan pula observasi dan dokumentasi. Data primer digunakan untuk melihat kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta komunikasi pembangunan partisipatif yang berlangsung di lapangan. Adapun data sekunder diperoleh melalui sumber dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Sambas, Badan Pusat Statistik (BPS) Sambas, dan kantor Desa Temajuk Kecamatan Paloh.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 16 untuk melihat distribusi frekuensi responden serta analisis korelasi untuk melihat hubungan antarvariabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian, partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan termasuk dalam kategori rendah (nilai rerata 49,13). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan disebabkan kurang optimalnya proses komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini mencakup seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Selain itu, kurang optimalnya proses komunikasi tersebut juga disebabkan oleh tidak dilakukannya kajian bersama pakar atau pendamping dalam membuat prioritas program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terdapat sejumlah indikator dalam menilai partisipasi masyarakat pesisir dalam proses komunikasi pembangunan, yakni tingkat konvergensi, tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan di lokasi penelitian menggambarkan keterlibatan petani dan nelayan pada saat musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) dusun/desa dan rembug warga. Proses musrenbang oleh pemerintah desa

dilaksanakan pada tingkat dusun dan desa sebagai ajang pertukaran informasi pada tahapan konvergensi, dialog dan pemanfaatan saluran komunikasi sehingga menunjang

proses pembangunan. Gambaran sebaran responden pada peubah tingkat komunikasi pembangunan partisipatif dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Responden Berdasarkan Perubahan Tingkat Komunikasi Pembangunan

Partisipatif			
Tingkat Komunikasi Pembangunan Partisipatif	Kategori	Jumlah (n)	Persen (%)
Tingkat Konvergensi Rerata skor 46,4	Sangat rendah	58	24,8
	Rendah	66	27,97
	Tinggi	74	31,35
	Sangat tinggi	38	16,10
	Jumlah	236	100
Tingkat Dialog Rerata skor 40,8	Sangat rendah	90	38,14
	Rendah	53	22,45
	Tinggi	51	21,61
	Sangat tinggi	42	17,80
	Jumlah	236	100
Tingkat pemanfaatan Saluran komunikasi Rerata skor 60,2	Sangat rendah	32	13,56
	Rendah	48	20,34
	Tinggi	60	25,42
	Sangat tinggi	96	40,68
	Jumlah	236	100
Total Rerata			49,13

Keterangan: rentang skor: sangat rendah 0 – 25, rendah 26 – 50, tinggi 51 – 75, sangat tinggi 76 – 100

Tingkat komunikasi pembangunan partisipatif berdasarkan hasil penelitian aspek tingkat konvergensi berada pada kategori rendah (rerata skor 46,4). Rendahnya aspek konvergensi ini disebabkan oleh tidak responsifnya proses penyampaian ide dan gagasan bersama dengan kebutuhan masyarakat. Ini terjadi lantaran ide dan gagasan masyarakat kurang diakomodasi oleh pemerintah dalam menetapkan rencana pembangunan desa. Ditambah lagi, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide cenderung lemah (tidak tertampung dalam pembangunan). Kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menyampaikan ide mereka pada saat musrenbang maupun rembug dusun/desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh informasi bahwa kontribusi masyarakat dalam menyampaikan ide di musrenbang dan rembug dusun/desa selama ini tidak menjadi prioritas pemerintah dalam menentukan program-program pemberdayaan masyarakat. Sumardjo (1999) mengemukakan bahwa komunikasi konvergen merupakan cara terbaik untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat, dalam bentuk integrasi lokal-nasional secara sinergis. Aspek konvergensi dalam komunikasi pembangunan partisipatif memiliki peranan penting dalam menentukan tujuan dan keberhasilan pembangunan berdasarkan ide dan gagasan bersama dalam perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Hasil penelitian pada tingkat dialog

berada pada kategori rendah (rerata skor 40,8). Rendahnya aspek dialog ini disebabkan oleh kurang aktifnya warga pada saat mengikuti kegiatan musrenbang atau diskusi rembug dusun/desa. Dalam forum itu, warga hanya datang dan mendengarkan saja tanpa terlibat dalam proses dialog. Kurang optimalnya peran masyarakat dalam dialog ini disebabkan oleh adanya anggapan masyarakat bahwa program-program pembangunan selama ini tidak berbasis kebutuhan desa dan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dialog dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat untuk menentukan program-program pembangunan. Sulistiani (2017) mengemukakan bahwa pembangunan partisipatif yang mengedepankan dialog dalam pelaksanaan pembangunan belum dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat akan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Abdullah *et al.* (2011) menjelaskan komunikasi berbentuk dialog ini memberikan ruang dan peluang bersama bagi *stakeholders* yang terlibat.

Tingkat pemanfaatan saluran komunikasi berada pada kategori tinggi (rerata skor 60,2). Tingginya aspek pemanfaatan saluran komunikasi ini karena masyarakat lebih menyukai metode komunikasi tertentu dalam menyampaikan informasi pembangunan. Pertama, yaitu penyampaian informasi melalui komunikasi interpersonal atau tatap muka secara langsung. Kedua, menggunakan komunikasi kelompok yang dilakukan pada kelompok kecil di masyarakat seperti kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok sadar wisata, Karang Taruna, PKK, kelompok pengajian dan kelompok pemuda

desa. Ketiga, menggunakan komunikasi media rakyat seperti acara menonton bersama dengan menggunakan layar tancap dan panggung rakyat. Saluran komunikasi merupakan media interaksi sosial dalam menginformasikan setiap program. Dengan saluran komunikasi, masyarakat dapat mengetahui setiap program yang dilaksanakan di lingkungan desa sehingga partisipasi masyarakat menyebabkan proses pembangunan menjadi lebih efektif. Saluran komunikasi bisa menjadi alternatif bagi pemerintah sebagai forum komunikasi dalam mengembangkan ide atau gagasan bersama serta menginformasikan program-program pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa masyarakat lebih sering berkomunikasi secara tatap muka dalam kelompok kecil untuk berdiskusi tentang program pembangunan. Ini disebabkan lebih terbukanya hubungan sesama masyarakat dan adanya faktor kedekatan di dalam kelompok. Metode komunikasi tatap muka, berkelompok dan menggunakan media rakyat membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan pemerintah karena sifat komunikasinya yang informal.

Hasil uji korelasi Pearson secara umum menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan mengindikasikan hubungan yang lemah pada $P < 0,01$ dan $P < 0,05$. Faktor-faktor yang menunjukkan hubungan antara karakteristik individu, lingkungan sosial, intervensi pemerintah dan dukungan infrastruktur dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif di perbatasan antarnegara dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Korelasi Antara Karakteristik Individu, Lingkungan Sosial, Intervensi Pemerintah dan Dukungan Infrastruktur Dengan Tingkat Komunikasi Pembangunan Partisipatif

Nama Peubah	Komunikasi Pembangunan Partisipatif		
	Tingkat Konvergensi	Tingkat Dialog	Tingkat Pemanfaatan Saluran Komunikasi
Karakteristik Individu			
Umur	0,073	0,178**	0,145*
Tingkat pendidikan formal	0,129*	0,090	0,088
Jumlah tanggungan keluarga	0,156*	0,155*	-0,034
Pengalaman bekerja	0,154*	0,147*	0,140*
Tingkat pendapatan	0,073	0,117	0,059
Perspektif gender	0,552**	0,561**	0,357**
Penguasaan akses	0,578**	0,433**	0,385**
Lingkungan Sosial			
Tingkat pengaruh luar negeri	0,311**	0,224**	0,368**
Intensitas konflik perbatasan	0,345**	0,313**	0,321**
Tingkat isolasi wilayah	0,331**	0,207**	0,316**
Intensitas perlintasan batas	0,138*	0,083	0,071
Tingkat ketertinggalan	0,181**	0,065	0,232**
Tingkat ketergantungan	0,124	-0,012	0,125
Intervensi Pemerintah			
Pembangunan infrastruktur dasar	-0,028	-0,184**	0,107
Pembangunan ekonomi	0,078	-0,071	0,245**
Pembangunan pertahanan keamanan	0,180**	0,021	0,120
Dukungan Infrastruktur			
Transportasi	0,100	0,021	0,083
Sarana komunikasi	0,228**	0,124	0,245**
Kelembagaan ekonomi	0,358**	0,290**	0,187**

Keterangan: *signifikan pada $\alpha < 0,05$ dan ** signifikan pada $\alpha < 0,01$

Pengujian korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antarvariabel penelitian. Hipotesis alternatif (H_a) pada dua variabel pertama, yaitu karakteristik individu dan komunikasi pembangunan partisipatif menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik individu dan komunikasi pembangunan partisipatif. Adapun hipotesis awal (H_o) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu dan komunikasi pembangunan partisipatif.

Hasil uji korelasi tentang karakteristik individu meliputi umur, tingkat pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman bekerja, tingkat pendapatan,

perspektif gender dan penguasaan akses terhadap sumber informasi. Korelasi nyata dan positif tampak dalam hubungan antara umur dengan tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Semakin tinggi umur petani dan nelayan maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan pada aspek dialog dan aspek pemanfaatan saluran komunikasi. Rendahnya partisipasi masyarakat diduga lantaran kelompok muda jarang mengikuti musrenbang desa atau dusun dan rembug desa, sehingga kelompok usia tua yang lebih aktif dalam kegiatan pembangunan.

Tingkat pendidikan formal berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi.

Semakin tinggi pendidikan formal petani dan nelayan maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan pada aspek konvergensi. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi aktif adalah mereka yang tamat SLTP dan SLTA. Rendahnya keaktifan masyarakat ditunjukkan oleh rerata waktu mengikuti pendidikan formal masyarakat yang tamat SD dan tidak sekolah sebanyak 7,3 tahun (setara tamatan Sekolah Dasar atau tidak lulus SMP). Gambaran sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan formal mereka dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Pendidikan	Kategori	Jumlah (n)	Persen (%)
Pendidikan Formal	1 – 6	150	63,6
Rerata 7,3 tahun	7 – 9	48	20,3
	10 – 12	35	14,8
	>13	3	1,3
	Jumlah	236	100

Keterangan: rentang skor: sangat rendah 0 – 25, rendah 26 – 50, tinggi 51 – 75, sangat tinggi 76 – 100

Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tahapan proses partisipasi dalam pembangunan.

Jumlah tanggungan keluarga berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi dan tingkat dialog. Semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan pada aspek konvergensi dan dialog. Jumlah tanggungan keluarga memengaruhi tingkat pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jumlah tanggungan keluarga jelas akan memengaruhi tingkat pendapatan keluarga. Penelitian Aminah (2013)

menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi pula angka beban tanggungannya. Beban tanggungan rumah tangga dapat berhubungan dengan kondisi ekonomi suatu rumah tangga.

Pengalaman bekerja berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi, tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Semakin lama pengalaman bekerja petani dan nelayan maka semakin dinamis partisipasi mereka dalam komunikasi pembangunan pada aspek konvergensi, dialog dan pemanfaatan saluran komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman bekerja di sektor pertanian dan perikanan selama 15 tahun belum mampu menaikkan tingkat partisipasi masyarakat. Ini disebabkan baru dilibatkannya warga dalam musrenbang desa atau dusun dan rembug desa pada tahun 2015.

Perspektif gender berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi, tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Hal ini disebabkan semakin dipandang pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan karena adanya kesetaraan peran dan hak perempuan dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam proses dialog atau musyawarah. Dalam hal ini, proses dialog itu berlangsung melalui saluran komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan media rakyat sehingga partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan menjadi semakin tinggi.

Penguasaan akses pada sumber informasi, sarana dan prasarana berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi, tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Semakin dinamis akses masyarakat terhadap sumber informasi serta sarana dan prasarana yang tersedia di desa

dapat meningkatkan pengembangan diri petani dan nelayan dalam menunjang program pembangunan. Akses sarana dan prasarana meliputi ketersediaan infrastruktur untuk aktivitas dan kegiatan masyarakat. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk memperoleh informasi cenderung rendah, terutama informasi tentang pelatihan dalam bidang pertanian dan perikanan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya penyuluh pertanian dan perikanan yang menjadi sumber informasi dalam pengembangan diri mereka. Penelitian Humaizi (2018) mengemukakan bahwa masyarakat di Aceh Timur lebih mudah mengakses siaran radio dan televisi Malaysia daripada mengakses Radio Republik Indonesia (RRI) di kawasan perbatasan negara.

Faktor lingkungan sosial secara keseluruhan memiliki hubungan nyata dan positif dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif, kecuali pada tingkat ketergantungan. Hal ini disebabkan adanya upaya masyarakat dalam meningkatkan ketahanan mereka terhadap berbagai kondisi lingkungan sosial di perbatasan antarnegara.

Tingkat pengaruh luar negeri berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi, tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Semakin tinggi ketahanan masyarakat dari pengaruh luar negeri, semakin tinggi partisipasi masyarakat pesisir dalam komunikasi pembangunan. Penguatan ketahanan masyarakat dari pengaruh luar negeri merupakan upaya untuk tetap menjaga hubungan baik antara dua warga negara. Interaksi antarwarga dua negara dan faktor kesamaan suku dan budaya, partisipasi mereka dalam kegiatan kemasyarakatan (hari raya, kematian, selamat kelahiran, perkawinan dan kesenian), kebersamaan,

gotong royong dan aktivitas ekonomi kedua warga negara akan meningkatkan proses partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan.

Intensitas konflik perbatasan berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi, tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Semakin kuat tingkat ketahanan masyarakat terhadap konflik perbatasan maka semakin tinggi proses partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Ketahanan masyarakat terhadap konflik perbatasan merupakan ketahanan terhadap konflik di perbatasan negara yaitu: konflik antara dua warga negara, konflik terkait lahan pertanian, perubahan sistem kekerabatan, kondisi kesenjangan pembangunan di perbatasan negara, serta konflik terkait tapal batas negara.

Tingkat isolasi wilayah berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi, tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Semakin terisolasi sebuah wilayah perbatasan negara maka semakin rendah partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Kondisi wilayah perbatasan negara yang terisolasi ini harus segera mendapatkan perhatian pemerintah. Utamanya menyangkut sarana infrastruktur dan akses teknologi komunikasi yang dapat menunjang aktivitas masyarakat, meningkatkan kegiatan pengembangan dan pelatihan di masyarakat, serta mengembangkan lembaga sosial dan lembaga ekonomi di kawasan perbatasan negara.

Intensitas perlintasan batas berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi. Semakin rendah intensitas perlintasan batas yang dilakukan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan

pada aspek konvergensi. Intensifnya aktivitas perlintasan batas disebabkan oleh lebih dekatnya jarak tempuh masyarakat ke Telok Melano Malaysia, sehingga sangat menunjang segala aktivitas masyarakat jika dibandingkan dengan ibu kota kecamatan yang berjarak 74 km dan harus ditempuh dengan jalan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, infrastruktur menjadi faktor utama untuk meningkatkan interaksi antarwarga satu kecamatan sehingga akan menunjang proses partisipasi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.

Tingkat ketertinggalan berhubungan nyata dan positif dengan tingkat konvergensi dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Semakin rendah kondisi ketertinggalan maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Pengembangan desa tertinggal harus dilakukan melalui program-program pembangunan, terutama infrastruktur untuk menunjang aktivitas dan interaksi masyarakat. Percepatan pembangunan ekonomi perlu didukung dengan ketersediaan lembaga ekonomi desa dan media komunikasi untuk menunjang efektivitas proses komunikasi di desa. Misalnya, keberadaan radio dan televisi lokal dan nasional untuk kawasan perbatasan, serta jaringan seluler dan internet yang memadai di kawasan tersebut. Tamba (2007) mengemukakan bahwa lingkungan sosial merupakan faktor sosial yang kondusif. Ketersediaan lembaga dan media komunikasi konvensional meliputi keberadaan dan keandalan lembaga dan media tersebut untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lingkungannya.

Pembangunan ekonomi dan pembangunan pertahanan keamanan berhubungan nyata dan positif dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif, kecuali

pembangunan infrastruktur dasar yang menunjukkan korelasi negatif. Pembangunan ekonomi berhubungan nyata dan positif dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif pada aspek pemanfaatan saluran komunikasi. Artinya, semakin baik pembangunan ekonomi maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat pesisir dalam komunikasi pembangunan. Percepatan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama kemandirian masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Pembangunan pertahanan keamanan berhubungan nyata dan positif dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif pada aspek konvergensi. Semakin baik pembangunan pertahanan keamanan maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat pesisir dalam komunikasi pembangunan. Adapun korelasi negatif antara intervensi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dasar dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif disebabkan cenderung rendahnya tingkat dialog yang dilakukan petani dan nelayan dalam proses pembangunan seiring dengan tingginya intervensi pemerintah dalam program pembangunan di desa.

Intervensi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dasar, pembangunan ekonomi dan pembangunan pertahanan keamanan harus lebih melibatkan partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam penyampaian gagasan yang sesuai dengan kebutuhan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Andi *et al.* (2015) mengemukakan bahwa analisis komunikasi partisipatif pada intensitas pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah yang terintegrasi dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan.

Dukungan infrastruktur dari pemerintah telah dirasakan hasilnya oleh petani dan

nelayan di desa Temajuk. Sarana komunikasi berhubungan nyata dan positif dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif. Semakin memadai sarana komunikasi yang dimiliki petani dan nelayan maka semakin tinggi tingkat partisipasi mereka dalam komunikasi pembangunan. Sarana komunikasi yang sudah dimanfaatkan oleh petani dan nelayan adalah telepon seluler dan akses internet di pusat desa. Sarana tersebut mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat di luar desa Temajuk. Adapun media radio nasional belum dapat dimanfaatkan karena jangkauan siarannya belum sampai ke wilayah tersebut. Sementara televisi nasional masih belum dapat dimanfaatkan tanpa bantuan parabola. Keberadaan media radio dan televisi nasional harus menjadi prioritas pemerintah. Kelembagaan ekonomi berhubungan nyata dan positif dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif. Artinya, semakin memadai kelembagaan ekonomi di desa Temajuk akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam komunikasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga ekonomi seperti koperasi petani, bank dan lembaga pemasaran untuk menunjang kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan antar negara belum tersedia. Pemerintah harus memperkuat kelembagaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di perbatasan antar negara. Skorobogatova *et al.* (2017) mengemukakan bahwa infrastruktur transportasi memfasilitasi pengembangan hubungan antar wilayah di dalam suatu negara dan antar negara, dan mendukung pembentukan hubungan ekonomi, sosial dan budaya bersama. Dengan demikian, terdapat korelasi positif yang kuat antara

pembangunan infrastruktur transportasi dengan aktivitas perekonomian antar wilayah.

Hubungan antar faktor ini mempertegas korelasi antara karakteristik individu, lingkungan sosial, intervensi pemerintah dan dukungan infrastruktur dengan tingkat komunikasi pembangunan partisipatif. Partisipasi masyarakat pesisir sangat mendukung program pembangunan di perbatasan antar negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi masyarakat pesisir dalam komunikasi pembangunan di perbatasan antar negara tergolong rendah, yang terlihat pada tingkat konvergensi, tingkat dialog dan tingkat pemanfaatan saluran komunikasi. Hal ini berdampak pada lemahnya konvergensi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat pesisir dalam komunikasi pembangunan, antara lain adalah aspek karakteristik individu yaitu umur, pendidikan formal, jumlah tanggungan keluarga dan pengalaman pribadi. Selain itu, faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh luar negeri, intensitas konflik perbatasan, tingkat isolasi wilayah, intensitas perlintasan batas dan tingkat ketertinggalan juga berkorelasi dengan partisipasi komunikasi pembangunan.

Dominasi intervensi pemerintah pada aspek pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan ekonomi dan pembangunan pertahanan berkorelasi dengan partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Dukungan infrastruktur pada aspek sarana komunikasi dan kelembagaan ekonomi juga berkorelasi dengan partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan.

Peningkatan partisipasi komunikasi pembangunan dapat dilakukan dengan proses

sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antarnegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sambas, masyarakat desa Temajuk dan semua responden yang berpartisipasi dalam proses penelitian ini. Kepada Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah MYH, Bakar NRA, Sulehan J, Awang A.H, & Liu O.P. (2011). Communication and Community Development at Rural Levels: Sharing Experiences between Indonesia and Malaysia. *Malaysian. Jurnal Melayu*, (6) : Hal 227-237.
- Andi A.M , Supratomo, & Iqbal S. (2015). Analisis Komunikasi Partisipatif Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Resapan Banjir Di Danau Tempe Kabupaten Wajo. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 4 (3): Hal 226 – 238
- Aminah S. 2013. *Model Komunikasi Partisipatif Untuk Keberdayaan Petani Kecil dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Barat*. [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Bappeda Kabupaten Sambas. (2016). *Profil Kabupaten Sambas 2016*. Sambas: Bappeda Kabupaten Sambas.
- Bappenas. (2015). *Laporan Akhir Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Perbatasan*. Jakarta: Bappenas
- Bungin B. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta (ID) : Kencana.
- Effendi B. (2002). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaiindo Media dan Offset.
- Humaizi. (2018). The Correlation between Broadcasting Spill-Over of Malaysian Television and Radio on Islamic Religious Knowledge of Community Members in East Aceh. *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*. Jilid 34 (1) : Hal 202-217
- Inagaki N. (2007). *Communicating the Impact of Communication for Development Recent Trends in Empirical Research*. Washington, U.S.A: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Kheerajit C & Flor A.G. (2013). Participatory Development Communication for Natural Resources Management in Ratchaburi Province, Thailand. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 103: Hal 703 – 709.
- Mikkelsen B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Penerjemah Mathoes Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Msibi F & Penzhorn C. (2010). Participatory Communication for Local Government in South Africa :

- A Study of the Kungwini Loca Municipality. *Article Information Development*. 26 (3): Hal 225-236. South Africa: Sage Publications.
- Muchtar K. (2016). Penerapan Komunikasi Partisipatif Pada Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Makna*, Vol 1. No. 1: Hal 20 -32.
- Purba J. (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta (ID) : Yayasan Obor Indonesia.
- Rogers EM. (1976). *Communication in Organization*. New York (US) : The Free Press.
- Rogers EM. (Ed.) (1989). *Komunikasi dan Pembangunan. Perspektif Kritis*. Penerjemah Dasmur Nurdin. Jakarta (ID) : Penerbit LP3ES.
- Servaes J & Malikhao P. (2016). Communication is essential for global impact. *Procedia Engineering*, 159: Hal 316 – 321.
- Sevilla G, Consuelo. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Penerjemah Alimuddin Tuwu. Jakarta: UI Press.
- Skorobogatova O, Kuzmina I, Merlino . (2017). Transport Infrastructure Development Performance. *Procedia Engineering* 178. 2017 : Hal 319 – 329.
- Sulistiani I, Sumardjo, Ninuk P, Basita G.S. (2017). Peran Komunikasi Dalam Pengembangan Energi Sosial Masyarakat Di Papua. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*. Vol. 18 (1), hal. 43-56.
- Sumardjo. (1999). *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani (kasus di Propinsi Jawa Barat)*. [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sumardjo. (2010). *Penyuluhan Menuju Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Orasi Ilmiah Guru Besar dalam Rangka Dies Natalis IPB ke-47.
- Sutaat. (2012). Social Empowerment In Border Area ; Study of problems, needs and Resources in Jagoi village, District Jagoi Babang, Municipality Bengkayang, West Kalimantan. *Jurnal Sosiokonsepsia*. Vol. 17 (1): Hal 52 – 71.
- Tamba M. (2007). *Kebutuhan Informasi Pertanian dan aksesnya bagi Petani Sayuran: Pengembangan Model Penyediaan Informasi Pertanian dalam Pemberdayaan Petani, Kasus di Provinsi Jawa Barat*. [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.